LITERASI BERBASIS APLIKASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA POLITIK BAHASA DI SEKOLAH MENENGAH

Nurhaidah [a], Muhamad Zainal Arifin [b]
[a] Universitas Pendidikan Indonesia
[b] Universitas Pendidikan Indonesia
Pos-el: nurhaidah@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya asing yang memberikan dampak terhadap kestabilitasan fungsi bahasa Indonesia. Keadaan tersebut dibuktikan oleh istilah asing yang digunakan baik dalam iklan, surat kabar, atau naskah-naskah publikasi, yang juga merambah ke dunia pendidikan. Selain itu, di tengah beragamnya bahasa daerah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau formal sering kali mendapat interferensi bahkan dialihfungsikan. Oleh karenanya diperlukan upaya dalam hal pembinaan, pengembangan dan pemeliharaan bahasa Indonesia dari berbagai bidang yang dikenal dengan politik bahasa. Pendidikan merupakan bidang yang dinilai tepat sebagai wadah pengaplikasian politik bahasa dan satu di antaranya dengan literasi. Selain sebagai wadah menyalurkan politik bahasa, literasi dipilih sekaligus memberikan solusi permasalahan kurangnya kemampuan literasi siswa. Fakta sebaliknya terjadi pada besarnya kuantitas pengguna internet dan daya tarik siswa terhadap bidang teknologi. Kedua hal yang saling kontradiksi tersebut dijembatani oleh usaha memadukan literasi dengan teknologi yang dikenal dengan literasi digital. Literasi digital saat ini sedang marak disosialisasikan dan diterapkan di bidang pendidikan. Akan tetapi, kelengkapan bahan bacaan saat ini belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kelengkapan bahan bacaan tanpa mengenyampingkan aspek konten, bahasa, dan tingkat kemampuan kognitif pembaca merupakan hal yang penting guna memfasilitasi literasi. Peluang tersebut dapat diisi dengan menciptakan bahan ajar nonformal yang telah distandarisasi dalam bentuk kurasi digital tanpa mengenyampingkan tujuan pembinaan dan pemeliharaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan konsep literasi berbasis aplikasi digital sebagai upaya politik bahasa di sekolah menengah dengan metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data studi pustaka berupa hasil penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.
Kata kuci: literasi berbasis aplikasi digital, politik bahasa, sekolah menengah.

Abstract

This research is motivated by the development of the development of science technology and culture that provides impact to the stability of the function of the Indonesian language. The situation that is proven by the use of new terms in advertisements, newspapers, or publications, which is also being extended to the education field and formal speeches. Moreover, among the variety of local language, the function of the Indonesian language as an official or formal language often gets interference or even being misused. Therefore, efforts are needed as a guidance, development and

maintenance of Indonesia language from various fields which is known as language politic one of them with literacy. Education is an appropriate field due to the rules of language use which is clearly defined as the language of instruction. Politic language in education can be implemented by strengthening the role of Indonesian language in learning. The process can be applied by introducing Indonesian language through the literacy. Besides, literacy is chosen as well as providing solutions to the problem of students' literacy problem. On the other hand, the big quantity of internet users and students' interest in the field of technology is found. These contradictories fact are tied by integrating literacy with technology which is defined as digital literacy. Digital literacy is currently being socialized to the society and education field. However, reading materials have not been being taken into account by the government. The completeness of reading materials without putting aside some aspects, such as content, language, and cognitive abilities of readers is essential to facilitate literacy. These opportunities can be fulfil by constructing non-formal learning materials which have been standardized in digital curation without putting aside the aims of coaching and Indonesian language preservation. Therefore, this research offers a digital application-based concept of literacy as a language political effort in middle schools with qualitative research methods and data collection techniques using literature studies in the form of the results of previous research and theories relevant to this study.
***Keywords**: literation based on digital applications, language politics, middle school.*

PENDAHULUAN

Maraknya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya asing saat ini tidak terlepas dari peran bahasa sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, bahasa merupakan komponen yang mendapat dampak dari perkembangan tersebut. Satu di antaranya adalah penggunaan bahasa asing yang mulai menggeser fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek. Munsyi (Sumadyo, 2010, hlm.170) mengungkapkan saat ini bahasa Indonesia menunjukkan bangsa Indonesia telah sampai pada perkembangan yang paling menyedihkan, menjengkelkan, sekaligus juga memuakkan. Lebih lanjut Sumadyo (2010, hlm.175) mengatakan bahwa orang asing justru lebih menyukai dan menghargai bahasa Indonesia daripada orang Indonesia itu sendiri. Jika hal ini terus berlanjut, kekhawatiran bahwa bahasa Indonesia akan "tergantikan" oleh bahasa asing mungkin saja akan terbukti. Keadaan tersebut dapat dilihat juga melalui penggunaan istilah asing baik dalam iklan, surat kabar, atau naskah-naskah publikasi maupun dunia pendidikan.

Adanya hal tersebut mengindikasikan ketidakstabilan fungsi bahasa Indonesia. Ketidakstabilan fungsi bahasa Indonesia bukan karena tidak adanya kebijakan bahasa, melainkan sebagaimana dikemukakan di awal bahwasanya bahasa merupakan alat perkembangan ilmu dan teknologi yang akan selalu mendapat dampak dari hal tersebut.

Oleh karenanya kebijakan bahasa harus tetap disesuaikan dengan kondisi guna menjadikan bahasa Indonesia tetap layak sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sehingga fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek tetap optimal.

Gunarwan (2003, hlm. 12) mengatakan hidup atau matinya bahasa bergantung kepada para penuturnya, keputusan membiarkan bahasa bergeser atau bertahan itu semata-mata bergantung kepada sikap masyarakat bahasa itu sendiri. Tambahan pula Ghani (2013, hlm. 8) mengatakan selain penguatan bahasa melalui pembangunan korpus bahasa, usaha yang juga perlu dilakukan untuk memperkasakan unsur yang paling penting dalam ekologi kerelevanan dan kelestarian sesuatu bahasa itu, yaitu penggunanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ghani (2013, hlm. 3) juga mengatakan bahasa itu harus direvolusikan, bukannya dibiarkan berevolusi sendiri-sendiri sesuai penggunanya karena ilmu berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang sains, teknologi, *kejuruteraan* dan matematik. Usaha tersebut dilakukan guna menjaga kestabilitasan kedudukan bahasa Indonesia yang tertuang secara eksplisit dalam UUD 1945 Bab XV, pasal 36, UU No. 24/2009 dan terkait fungsi telah ditetapkan melalui hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25—28 Februari 1975 yang kini diperbaharui dengan rumusan Seminar Politik Bahasa di Bogor tanggal 8—12 November 1999. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan bahasa yang melibatkan pengguna untuk kontak langsung dengan bahasa.

Implementasi dari kebijakan tersebut sangat diperlukan agar kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang telah ditetapkan dapat berjalan maksimal (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1976b). Implementasi keputusan tersebut dapat berupa upaya merealisasikan politik bahasa dalam berbagai bidang.

Pendidikan merupakan bidang yang dinilai tepat karena pengaturan penggunaan bahasa Indonesia secara jelas ditetapkan sebagai alat pengantar dalam pembelajaran sehingga dikenal sebagai alat pendidikan nasional. Selain sebagai alat pendidikan nasional, pengajaran bahasa Indonesia juga sebagai pembinaan bahasa Indonesia (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1976b, hlm. 47). Upaya tersebut dikenal sebagai politik bahasa.

Politik bahasa dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Penguatan peran dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan mengenalkan bahasa Indonesia melalui pembelajaran literasi. Selain sebagai wadah menyalurkan politik bahasa, literasi dipilih sekaligus memberikan solusi

permasalahan literasi di dunia pendidikan. Survei yang dilakukan UNESCO menempatkan kemampuan literasi siswa Indonesia di peringkat 60 dari 61 negara (Nadya, 2017, hlm. 1). Literasi dipilih sebagai upaya politik bahasa juga dinilai tepat karena tujuan utama pendidikan adalah perolehan keterampilan keaksaraan oleh para pembelajar yang akan memungkinkan mereka untuk mengakses dan menggunakan informasi, mengembangkan keterampilan intelektual, mengekspresikan diri mereka melalui media bahasa dan akhirnya lebih memahami diri mereka sendiri dan lingkungan sosial dan budaya mereka (Papapavlou & Pavlou, 2005, hlm. 164). Selain itu, kurikulum Indonesia bersifat pragmatis atau komunikatif yang dinyatakan dalam silabus standar untuk buku-buku pelajaran membaca diberi bobot lebih besar daripada keterampilan produktif (Nababan, 2014).

Literasi merupakan kemampuan individu mengolah dan memahami informasi saat membaca atau menulis sehingga sangat tepat menjadi sarana memperkaya pembendaraharaan kosakata, menambah wawasan terkait bahasa dan mengembangkan kreativitas kemampuan bahasa produktif sebagai upaya membina dan melestarikan bahasa Indonesia. Upaya tersebut selayaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa saat ini.

Sebagaimana dikemukakan Kirchoff (2017, hlm. 117) siswa saat ini hidup di dunia yang semakin digital, sehingga penguasaan alat dan keterampilan digital bukan semata-mata kemewahan, tetapi sebuah kebutuhan. Hasil riset oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama dengan Pusat Kajian Komunikasi (Pusakom) menunjukkan jumlah pengguna internet telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menunjukan kenaikan sebesar 10,56 juta jiwa dari hasil survei pada tahun 2016 (Kominfo, 2018, hlm. 1). Risetnya lainnya dilakukan oleh Son (2017, hlm. 95) dengan hasil dari dua penelitian yang dilakukan menunjukkan semua peserta paham teknologi digital dan tertarik menggunakannya berupa kepemilikan perangkat seluler seperti kamus elektronik, ponsel pintar, komputer tablet dan laptop, dari total 170 peserta. Beers dkk. (2010, hlm. 4) menyatakan saat ini, banyak anak-anak lebih banyak membaca secara *online* daripada *offline*. Mereka tumbuh di dunia digital yang mengakibatkan mereka relatif sedikit membaca dan menulis melibatkan kertas, karena sebagian besar membaca dan menulis dalam alat digital (baik formal dan nonformal).

Besarnya kuantitas pengguna internet dan daya tarik siswa terhadap bidang teknologi memperkuat usaha memadukan literasi dengan teknologi sehingga dapat menjadi alternatif yang tepat untuk menjalankan politik bahasa. Perpaduan kedua bidang tersebut dikenal dengan nama literasi digital. Literasi digital perlu didorong sebagai mekanisme pembelajaran, yang terstruktur dalam kurikulum, atau setidaknya terkoneksi dengan sistem belajar-mengajar. Literasi digital menjadi wadah mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi, maraknya pengguna internet serta rendahnya literasi siswa di Indonesia. Selain itu, pemilihan siswa menengah sebagai sasaran literasi digital ini didasari oleh hasil survey pengguna internet tahun 2017 terbesar berdasarkan usia yakni rentang usia 13—18 tahun sebesar 75,50 %. (Kominfo, 2018, hlm. 1)

Literasi saat ini sedang marak disosialisasikan dan diterapkan sehingga memunculkan Gerakan Literasi Nasional. Usaha lainya ialah dengan memberlakukan peraturan mengenai gerakan literasi di awal pembelajaran dapat menjadi peluang literasi digital. Keberhasilan membangun literasi digital merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud, 2017, hlm. 5).

Literasi digital merupakan inovasi teknologi mengubah proses pengambilan informasi dan diseminasi dari analog ke digital melalui teks digital. Kumpulan teks digital membentuk bahan ajar itulah yang disebut sebagai kurasi digital. Kurasi digital dibuat dengan tujuan mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia melalui usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, kualitas bahan bacaan sangatlah penting. Akan tetapi, kelengkapan bahan bacaan saat ini belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kelengkapan bahan bacaan tanpa mengenyampingkan aspek konten, bahasa, dan tingkat kemampuan kognitif pembaca merupakan hal yang penting guna memfasilitasi literasi siswa. Peluang tersebut dapat diisi dengan menciptakan bahan ajar nonformal yang telah distandarisasi dengan bentuk kurasi digital tanpa mengenyampingkan tujuan pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia melalui literasi berbasis aplikasi digital sebagai upaya politik bahasa di sekolah menengah.

LANDASAN TEORI

Literasi Digital

Menurut UNESCO (dalam Kemedikbud 2017, hlm. 8) konsep literasi digital menaungi dan menjadi landasan penting kemampuan memahami perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Literasi menurut Tomskin (dalam Resmini, 2008, hlm.7) adalah kemampuan menggunakan membaca dan menulis dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karenanya konsep literasi digital merupakan perpaduan antara kegiatan literasi yang melibatkan alat digital. Literasi digital merupakan inovasi teknologi mengubah proses pengambilan informasi dan diseminasi dari analog ke digital melalui teks digital.

Terkait hal tersebut Selber (2004, hlm. 25) berpendapat bahwa ada "tiga posisi subjek yang terhubung ke bagian literasi digital meliputi: 1) siswa sebagai pengguna teknologi; 2) siswa sebagai penanya teknologi; dan 3) siswa sebagai produsen teknologi". Dengan demikian, posisi siswa dalam literasi ini meliputi: fungsional, kritis, dan keaksaraan retoris.

Literasi fungsional adalah kemampuan melakukan pekerjaan yang efektif menggunakan teknologi tertentu. Berbeda dengan fokus utama literasi fungsional, literasi kritis adalah kemampuan untuk mengenali, kritik, dan bereaksi terhadap bahan bacaan, sedangkan literasi retoris berkaitan dengan pemberdayaan penulis. Sejalan dengan hal tersebut, Kemedikbud (2017, hlm. 8) mengungkapkan literasi digital merupakan kecakapan (*life skills*) yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital.

Belshaw (2011, hlm. 206) mengatakan bahwa ada delapan elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital sebagai berikut.

1) Kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital.
2) Kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten.
3) Konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual.
4) Komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital.
5) Kepercayaan diri yang bertanggung jawab.
6) Kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru.
7) Kritis dalam menyikapi konten.

8) Bertanggung jawab secara sosial.

Kemendikbud (2017, hlm.7) telah menetapkan indikator literasi digital di sekolah sbb. *Pertama*, basis kelas berkaitan dengan jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan; intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran; dan tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet. *Kedua*, basis budaya sekolah berkaitan dengan a. jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital; b. frekuensi peminjaman buku bertema digital; c. jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan teknologi dan informasi; d. jumlah penyajian informasi sekolah dengan menggunakan media digital atau situs laman; e. jumlah kebijakan sekolah tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan sekolah; dan f. tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dan komunikasi dalam hal layanan sekolah (misalnya, rapor elektronik, pengelolaan keuangan, dapodik, pemanfaatan data siswa, profil sekolah, dsb.) *Ketiga*, basis masyarakat meliputi: jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi digital di sekolah dan tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, dan lembaga dalam pengembangan literasi digital.

Gerakan literasi digital di sekolah harus dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran yang terkoneksi dengan sistem belajar mengajar. Pengetahuan, keterampilan dan kreativitas siswa maupun guru perlu ditingkatkan dalam proses pengajaran literasi digital. Selain itu, pihak sekolah perlu memfasilitasi guru untuk mengembangkan budaya literasi digital.

Kemendikbud (2017, hlm. 9) merumuskan prinsip dasar pengembangan literasi digital sebagai berikut.

1. Pemahaman

Prinsip pertama literasi digital adalah pemahaman sederhana yang berupa kemampuan mengekstrak ide secara implisit maupun ekspilisit dari media.

2. Saling Ketergantungan

Saling ketergantungan yang dimaksud dalam literasi digital adalah suatu bentuk media yang dapat berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah guna mencapai tujuan literasi.

3. Faktor Sosial

Faktor sosial tidak hanya berupa distribusi informasi tetapi juga memerhatikan siklus distribusi informasi yang meliputi: siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi diberikan. Pemerhatian faktor sosial dimaksudkan tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tetapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri.

4. Kurasi

Kurasi berkaitan dengan penyimpanan informasi agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Kurasi tingkat lanjut harus berpotensi sebagai kurasi sosial, seperti bekerja sama untuk menemukan, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang bernilai. Menurut Mills (2013, hlm. 47), kurasi digital adalah pengayakan dan agregasi dari internet dan sumber daya lainnya menjadi koleksi agar dapat diakses oleh guru dan siswa secara mudah, relevan, personal dan dinamis. Dalam lingkungan digital, elemen tambahan dapat dimanfaatkan, seperti memasukkan media sosial untuk menyebarkan konten, kemampuan pengguna lain untuk menyarankan konten atau meninggalkan komentar dan evaluasi kritis dan pemilihan konten agregasi (Ungerer, 2016).

Sebagaimana prinsip literasi digital yang dikemukakan di atas, maka diperlukan sebuah inovasi berbentuk kurasi dalam menyimpan bahan bacaan agar mempermudah siswa untuk memperoleh tujuan literasi. Inovasi tersebut harus mampu memfasilitasi keempat prinsip yang dikemukakan di atas. Dengan inovasi tersebut siswa tidak hanya mampu menyerap ide, tetapi juga mampu menghubungkan informasi yang diperoleh dengan ide yang dimiliki agar dapat membentuk kerangka pemikiran yang tidak hanya dapat menyimpan informasi tetapi juga membagikan informasi.

Politik Bahasa

Politik bahasa nasional adalah kebijakan nasional yang berisi pengarahan, perencanaan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Keseluruhan masalah itu merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa dan sastra Indonesia, (2) masalah bahasa dan sastra daerah, dan (3) masalah bahasa asing di Indonesia.

Pengelolaan keseluruhan masalah bahasa itu memerlukan adanya suatu kebijakan nasional yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pengelolaan masalah bahasa-bahasa itu benar-benar berencana, terarah, dan menyeluruh (Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2011, hlm.3). Kebijakan bahasa sebagai praktik manusia muncul dari karakteristik paling mendasar kondisi linguistik manusia: ketegangan yang tak terhindarkan antara keberagaman linguistik di satu sisi dan saling ketergantungan antarmasyarakat (Peled, 2014, hlm. 301). Ricento (dalam Peled 2014, hlm. 301) mengatakan tidak ada teori menyeluruh tentang kebijakan dan perencanaan bahasa, sebagian besar karena kompleksitas masalah yang melibatkan bahasa dalam masyarakat. Oleh karenanya kebijakan bahasa harus dilakukan dengan hati-hati.

Masuknya unsur-unsur bahasa asing di tengah derasnya arus globalisasi tidak dapat dipungkiri berdampak pada ketidakstabilan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Meskipun demikian, bahasa Indonesia harus mempertahankan eksistensinya sebagai bahasa modern dengan tidak menutup diri dari masuknya unsur asing yang diperlukan sehingga dapat dilakukan penyerapan unsur asing melalui penyerasian dengan sistem bahasa Indonesia tanpa mengenyampingkan indentitas bahasa Indonesia. Kedua hal tersebut membutuhkan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia dalam suatu pemikiran yang dinamakan politik bahasa.

Indonesia telah lama memiliki politik bahasa. Politik bahasa pertama dilakukan melalui perumusan Sumpah Pemuda 1928 yang berisi pengakuan bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Adanya hal tersebut merupakan langkah pertama dalam perumusan garis kebijaksanaan mengenai bahasa Indonesia. Garis kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, yang menyatakan bahwa "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia", yang memberikan dasar kuat dan resmi bagi pemakaian bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa perhubungan pada tingkat nasional tetapi juga sebagai bahasa resmi kenegaraan. Tambahan pula politik bahasa juga terkandung dalam moto Kurikulum 2013 yang berbunyi “Bahasa Indonesia Penghela dan Pembawa Pengetahuan”. Moto demikian menyiratkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi media utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan.

Fungsi politik bahasa nasional diungkap Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1976b) adalah memberikan dasar dan pengarahan bagi perencanaan serta pengembangan bahasa nasional. Hal tersebut dapat memperjelas fungsi dan kedudukan

bahasa (nasional) dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Dengan demikian, mengutamakan bahasa Indonesia di negeri ini adalah hal yang semestinya dilakukan.

Arus globalisasi saat ini menuntut perencanaan terkait upaya menjadikan bahasa Indonesia tetap eksis di tengah maraknya tuntutan penguasaan bahasa asing. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia. Pengembangan bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pembinaan bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia sedangkan pelindungan bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. (Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2011, hlm. 9).

Kebijakan bahasa nasional dahulu didasarkan pada hasil Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1975. Namun, seiring dengan tuntutan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi dalam hubungan antarbangsa membuat Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (2011, hlm . 5) merumuskan kembali kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing sbb.

a. Bahasa Indonesia

Kedudukan bahasa Indonesia yakni sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, memiliki fungsi sebagai(1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya serta antardaerah. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36: Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bah as a pengantar resmi di lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, (4) bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, (5) sarana pengembangan dan

PUT WURI HANDAYANI

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, (6) bahasa media massa, (7) pendukung sastra Indonesia, dan (8) pemerkaya bahasa dan sastra daerah.

b. Bahasa Daerah

Kedudukan bahasa daerah dirumuskan atas kenyataan bahwa bahasa daerah digunakan sebagai sarana perhubungan dan pendukung kebudayaan di daerah atau di dalam masyarakat etnik tertentu di Indonesia. Maka dari itu, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah; (2) lambang identitas daerah; (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah; (4) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia; serta (5) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Di dalam hubungan dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa Indonesia; (2) bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan/atau pelajaran lain; dan (3) sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Dalam keadaan tertentu, bahasa daerah dapat juga berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah.

c. Bahasa Asing

Bahasa yang tersebar selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah berkedudukan sebagai bahasa asing. Bahasa asing baik yang digunakan dan diajarkan maupun yang digunakan tanpa diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan tingkat tertentu, tidak bersaing dengan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Bahasa asing juga tidak bersaing dengan bahasa-bahasa daerah, baik sebagai lambang ·nilai sosial budaya maupun sebagai alat perhubungan masyarakat daerah. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa asing di Indonesia, bahasa-bahaasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa rumpun Melayu, berfungsi sebagai (1) alat perhubungan antarbangsa dan (2) sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modem untuk pembangunan nasional. Bahasa-bahasa asing tertentu di Indonesia juga dapat memiliki fungsi lain seperti sebagai sumber pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam kaitan dengan pengembangan tata istilah keilmuan dan sebagai bahasa keagamaan dan budaya Islam sebagaimana pada bahasa Arab. Apabila diperlukan, bahasa-bahasa asing lain juga dapat berfungsi sebagai sumber pemerkayaan perbendaharaan kosakata.

Perumusan kedudukan beserta fungsi ketiga bahasa yang berkembang di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan kejelasan batas penggunaan bahasa tersebut. Dengan

Kongres Bahasa Indonesia

adanya kejelasan batasan penggunaaan ketiga bahasa tersebut moto kebijakan terkait ketiganya "Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah dan Kuasai Bahasa Asing" dapat direalisasikan dengan sebagaimana mestinya.

Literasi Berbasis Aplikasi Digital sebagai Upaya Politik Bahasa Indonesia di Tingkat Menengah

Literasi Berbasis Aplikasi Digital (LBAD) sebagai upaya politik bahasa Indonesia di tingkat menengah merupakan upaya pembinaan bahasa Indonesia di bidang pengajaran. Pemertahanan eksistensi bahasa Indonesia disesuaikan dengan tuntutan penguasaan alat digital dalam dunia pendidikan. Gencarnya kegiatan literasi yang dilakukan pemerintah merupakan sarana yang dinilai tepat untuk menyalurkan eksistensi bahasa Indonesia. Selain sebagai bentuk pemertahanan eksistensi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di bidang pendidikan, LBAD juga diharapkan mampu menjadi solusi dari rendahnya tingkat literasi siswa melalui literasi digital. Dengan meningkatkan keterampilan literasi digital, mereka akan menjadi pembelajar yang efektif dan mandiri yang dapat mengambil keuntungan dari alat dan sumber daya untuk pembelajaran bahasa dalam konteks otentik (Son, 2017).

LBAD berbentuk kurasi digital digunakan untuk memudahkan siswa mengakses materi bacaan yang terangkum dalam sebuah fitur aplikasi yang lengkap. Wolff dan Mulholland (2013) menyarankan untuk terlibat dalam belajar melalui kurasi karena dapat meningkatkan pemahaman tentang fungsi tertentu yang mendukung fitur belajar yang signifikan.

Prinsip yang dapat diterapkan dalam LBAD ialah konsep *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK). TPACK merupakan integrasi teknologi dengan bidang pembelajaran. Koehler& Mishra (2006, hlm.3) menyatakan dalam kerangka kerja TPACK, tiga basis meliputi: pengetahuan yang luas-teknologi, pedagogi, dan konten. Ketiga hal tersebut menyebabkan representasi konsep-konsep baru dan membutuhkan pengembangan kepekaan terhadap hubungan dinamis, transaksional antara ketiga komponen sehingga menghasilkan Pengajaran yang baik dengan teknologi yang dapat dilihat melalui gambar berikut.

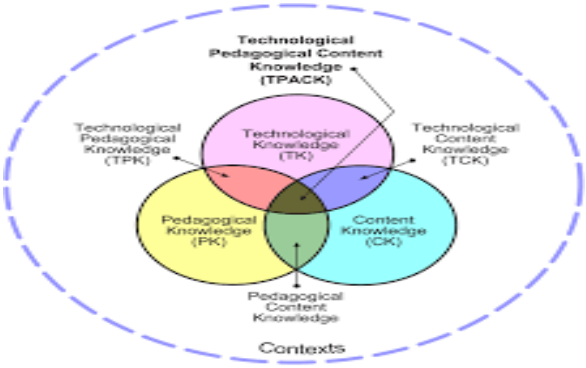

Sumber: Mishra & Koehler (2006, hlm.3)

Technological Knowledge (TK) mencakup pemahaman tentang bagaimana menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer, alat presentasi seperti penyaji dan proyek dokumen, dan teknologi lain yang digunakan dalam konteks pendidikan. Hal yang utama dalam TK ialah kemampuan beradaptasi dan belajar teknologi baru. Ungerer (2016) menegaskan bahwa siswa harus diajarkan keterampilan untuk mengakses informasi yang relevan dan menyaringnya untuk tujuan dan audiens yang spesifik. Terkait hal itu, pengembangan literasi digital dalam pendidikan bahasa memerlukan panduan praktis dan peluang untuk mempelajari alat digital dan sumber daya yang tersedia dan bagaimana menemukan dan menggunakannya untuk pembelajaran bahasa.

Content Knowledge (CK) mengacu pada pengetahuan atau sifat spesifik dari suatu disiplin atau materi pelajaran. CK sangat bervariasi antara konteks pendidikan yang berbeda (misalnya perbedaan antara konten bahasa Indonesia sekolah dasar dan bahasa Indonesia pascasarjana), dan guru diharapkan untuk menguasai konten yang mereka ajarkan. Pengetahuan konten juga penting karena menentukan pola pikir khusus disiplin untuk setiap bidang.

Pedagogical Knowledge (PK) menggambarkan pengetahuan "tujuan umum". Ini adalah seperangkat keterampilan yang harus dikembangkan guru untuk mengelola dan mengatur kegiatan belajar-mengajar untuk hasil pembelajaran yang diharapkan. Pengetahuan ini tidak terbatas melibatkan pemahaman mengenai kegiatan manajemen kelas, peran motivasi siswa, perencanaan pelajaran, dan penilaian pembelajaran, tetapi juga mendeskripsikan pengetahuan tentang metode pengajaran yang berbeda, seperti mengetahui bagaimana mengatur kegiatan dengan cara yang kondusif untuk membangun pengetahuan yang membangun siswa.

Pedagogical Content Knowledge (PCK) memiliki konsep bahawa konten yang berbeda membutuhkan metode pengajaran yang berbeda agar menghasilkan pengajaran yang efektif

Technological Content Knowledge (TCK) berkaitan dengan pengetahuan hubungan timbal balik antara teknologi dan konten. Teknologi memengaruhi apa yang kita ketahui, dan memperkenalkan

Teknologi Pedagogical Knowledge (TPK) mengidentifikasi hubungan timbal balik antara teknologi dan pedagogi. Pengetahuan ini memungkinkan untuk memahami apa yang dapat dilakukan teknologi untuk tujuan pedagogis tertentu, dan bagi para guru untuk memilih alat yang paling tepat berdasarkan kesesuaiannya untuk pendekatan pedagogis khusus.

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) menggambarkan pengetahuan yang disintesis dari masing-masing badan pengetahuan yang dijelaskan dengan fokus pada bagaimana teknologi dapat dibuat secara unik untuk memenuhi kebutuhan pedagogis untuk mengajarkan konten tertentu dalam konteks tertentu. Sendirian, masing-masing badan pengetahuan, yang terdiri dari TPACK, mewakili aspek penting dan penting dari pengajaran. TPACK memberikan pengetahuan mengenai teknologi, pedagogi, dan konten disintesis dan digunakan untuk desain pengalaman belajar bagi siswa.

Penerapan LBAD melalui pembelajaran *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) diharapkan mampu memfasilitasi siswa untuk mampu mengolah, menganalisa dan memahami informasi dari bahan bacaan yang terangkum dalam kurasi digital. Selain itu, Schacter mengatakan keefektifan teknologi pendidikan dipengaruhi oleh karakteristik siswa, desain perangkat lunak, peran pendidik, dan akses yang dimiliki oleh siswa terhadap teknologi. Maka dari itu, penggunaan TPACK dalam LBAD (*Technological Pedagogical Content Knowledge Exploring, Developing, and Assessing* TPACK, 2015, hlm. 6). Kegiatan literasi diharapkan dapat pemasyarakatan bahasa, meningkatkan mutu penggunaan bahasa serta wawasan terkait bahasa sehingga usaha membina, melestarikan bahasa dapat tercapai sebagai tujuan utama politik bahasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendeskripsikan konsep upaya politik bahasa melalui literasi digital dengan menciptakan wadah berbentuk kurasi berbasis aplikasi digital. Oleh karenanya,

metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka berupa hasil penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Zed (2004, hlm.3) mengungkapkan penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca atau mencatat serta mengolah bahan penelitian. Oleh karena itu, penyajian data dalam penelitian ini secara kualitatif dengan mendeskripsikan hasil kajian pustaka.

PEMBAHASAN

LBAD merupakan literasi yang menggunakan bahan bacaan yang sudah tersedia dan terstandarisasi yang terhimpun dalam sebuah aplikasi digital guna memudahkan dan memfasilitasi kegiatan literasi di sekolah tanpa mengenyampingkan usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia. Terkait hal tersebut Urgerer (2016, hlm. 1) mengatakan guru membutuhkan wawasan yang cukup dalam menggabungkan berbagai alat kurasi digital informal dalam praktik pendidikan. Pengajar keaksaraan memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan literasi baru ke dalam kurikulum untuk mempersiapkan siswa untuk partisipasi masyarakat yang sukses dalam lingkungan global (International Reading Association, 2009, hlm.1)

Sebagaimana konsep literasi digital yang dikemukaan oleh Kemedikbud (2017, hlm. 8) adalah kecakapan (*life skills*) yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Maka dari itu, penyediaan bahan bacaan yang bersisfat nonilmiah saja dalam gerakan literasi sebelum pembelajaran tidaklah cukup. Selain itu, pertimbangan adanya siswa yang tidak lebih menyenangi bacaan ilmiah. Maka dari itu, penulis menawarkan konsep literasi yang terangkum dalam sebuah aplikasi digital dengan berbentuk kurasi digital.

Bahan bacaan yang ditawarkan mulai dari teks ilmiah, semiilmiah, dan nonilmiah. Bahan bacaan tersebut tidak hanya digunakan saat literasi di awal pembelajaran. Kelengkapan bahan baacaan yang ditawarkan bukan hanya mendukung literasi prapembelajaran, melainkan juga dapat mendukung proses pembelajaran kelas tradisional untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran yang sesuai dengan ketersediaan kurasi tersebut. Selain sisi kelengkapan, bahan bacan tersebut harus melalui

proses kelayakan dan kesesuaian dengan tingkat pembaca. Dalam hal ini bahan bacaaan tersebut hanya terdiri dari dua tingkatan yakni tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau sederajat. Adapun materi yang dapat dimasukkan dalam literasi berbasis aplikasi digital tersebut terbagi menjadi dua materi yakni materi umum dan materi khusus yang diuraikan sbb.

a. Materi umum

Materi umum merupakan kumpulan bahan bacaan yang dihadirkan untuk membekali pengetahuan siswa terkait bahasa Indonesia. Materi umum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah materi yang berisikan bacaan terkait sejarah bahasa Indonesia atau hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Materi umum tersebut dapat diakses oleh siswa tingkat menengah pertama dan menengah atas.

1) Sejarah Bahasa Indonesia
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
3) Pedoman Tata Bahasa Baku
4) PUEBI

b. Materi khusus

Materi khusus merupakan kumpulan bahan bacaan yang dihadirkan untuk memfasilitasi literasi siswa. Berbeda dengan materi umum, materi ini hanya dapat diakses sesuai jenjang pendidikan.

1) Bacaan Ilmiah
2) Bacaan Semiilmiah
3) Bacaan Nonilmiah

Dengan membuat aplikasi berbasis digital yang membentuk kurasi dapat mewadahi bahan baacaan yang bukan hanya nonilmiah tetapi juga semiilmiah bahkan imiah dapat menunjang proses pembelajaran. Kurasi tersebut juga dapat mewadahi siswa yang senang membaca teks ilmiah.

Implementasi LBAD di tingkat menengah disesuaikan dengan mencakup tiga basis yang dikemukan oleh Mishra & Koehler (2006, hlm. 3) meliputi: pengetahuan yang luas-teknologi, pedagogi, dan konten harus menyebabkan representasi konsep-konsep baru dan membutuhkan pengembangan kepekaan terhadap hubungan dinamis, transaksional antara ketiga komponen sehingga menghasilkan Pengajaran yang baik dengan teknologi. Maka dari itu, keterkaitan ketiga basis tersebut dalam LBAD sbb.

TUTI NURI HANDAYANI

Technological Knowledge (TK) mencakup pemahaman tentang bagaimana menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer, alat presentasi seperti penyaji dan proyek dokumen, dan teknologi lain yang digunakan dalam konteks pendidikan sehingga memfasilitasi kemampuan untuk beradaptasi dan belajar teknologi baru.

Content Knowledge **(CK)** mengacu pada pengetahuan atau sifat spesifik dari suatu disiplin atau materi pelajaran. Sifat spesifik dari literasi dan guru diharapkan untuk menguasai konten yang mereka ajarkan.

Pedagogical Knowledge **(PK)** menggambarkan pengetahuan "tujuan umum" dalam kegiatan literasi. Guru harus dikembangkan untuk mengelola dan mengatur kegiatan literasi hasil pembelajaran yang diharapkan. Pegaturan tersebut meliputi: kegiatan manajemen kelas, peran motivasi siswa, perencanaan pelajaran, dan penilaian literasi. PK juga dapat mengondisikan kegiatan dengan cara yang kondusif untuk membangun pengetahuan siswa.

Pedagogical Content Knowledge **(PCK)** melibatkan siswa dalam tugas komunikatif yang bermakna dan otentik. Dalam hal ini guru memberikan tugas terkait aplikasi kemampuan berbahasa yang produktif, namun dengan kuantitas yang sedikit dibandingkan dengan literasi yang dilakukan, misalnya, menulis karya berdasarkan literasi yang dilakukan selama satu bulan terakhir. Dalam penulisan karya, siswa diberi kebebasan untuk menulis karya berupa ilmiah, semiilmiah atau bahkan ilmiah.

Technological Content Knowledge **(TCK)** menjelaskan pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara teknologi dan konten. Teknologi memengaruhi apa yang kita ketahui, dan memperkenalkan kemampuan baru tentang bagaimana kita dapat merepresentasikan konten tertentu dengan cara-cara baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan, misalnya, setelah membaca teks pantun siswa, mengetahui ciri pantun, dan bisa membuat pantun.

Teknologi Pedagogical Knowledge **(TPK)** mengidentifikasi hubungan timbal balik antara teknologi dan pedagogi. Dalam hal ini guru dapat menjelaskan kepada siswa bahwasanya setelah mendapatkan pengetahuan dari proses literasi kalian dapat mengajarkannya kepada orang lain.

Technological Pedagogical Content Knowledge **(TPACK)** bagian ini merupakan pengetahuan yang disintesis dapat diajarkan kepada orang lain sebagai desain

pengalaman belajar bagi siswa dengan menyalur kreativitasnya melalui tulisan terkait literasi yang dilakukan.

Adapun sintaks penerapan LBAD dengan konsep TPACK di kelas tradisional dimulai dari pengajar, *pertam*a mempratinjau dan mediskusikan dengan pimpinan terkait aplikasi yang tersedia yang akan mendukung sasaran literasi dan pendekatan pedagogis (misalnya, pembacaan independen, kelompok kecil, instruksi seluruh kelas) untuk menemukan kelayakannya. *Kedua*, merancang kegiatan literasi kelas di bidang pemahaman, kelancaran, kosakata, dan sebagainya yang akan memanfaatkan fitur dengan menimbang konten literasi yang akan diajarkan dan pendekatan pedagogis yang akan digunakan. *Ketiga*, mengembangkan kegiatan instruksional yang memungkinkan siswa untuk mendesain tanggapan terhadap teks yang menunjukkan pemahaman dan mengembangkan keterampilan literasi digital. *Keempat*, memberikan waktu kepada siswa untuk menjelajahi dan bereksperimen dengan alat sambil menunjukkan kepada mereka fitur-fitur utama (misalnya, menggunakan kamus dll.) Dalam hal ini guru dapat menjelaskan kepada siswa bahwasanya setelah mendapatkan pengetahuan dari proses literasi kalian dapat mengajarkannya kepada orang lain. *Kelima*, memperkenalkan bahan bacaan baru dan mengelola hasil literasi siswa dengan memberikan mereka peluang untuk menyalur kreativitasnya melalui tulisan terkait literasi yang dilakukan.

Konsep literasi digital menaungi dan menjadi landasan penting kemampuan memahami perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi yang direalisasikan melalui kegiatan membaca dan menulis teks digital. LBAD melibatkan siswa fungsional yang mampu menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, mampu mengenali, mengkritik, dan memberikan respon bahan bacaan dan mampu menghasilkan produk berdasarkan kegiatan literasi yang dilakukan dalam konteks ini siswa mampu menulis berbagai jenis karya baik ilmiah, semiilmiah dan nonilmiah setelah pembimbingan yang dilakukan melalui konsep pembelajaran TPACK.

Akhir dari literasi yang dilakukan ialah siswa dibekali kecakapan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Selain itu, seringnya kontak dengan bahasa Indonesia dapat meningkatkan pembendaharan kosakata, kemampuan berbahasa produktif serta wawasan terkait bahasa Indonesia. Adanya dampak yang ditimbulkan

tersebut merupakan indikasi keberhasilan pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia yang menjadi fungsi dari politik bahasa.

PENUTUP

LBAD merupakan upaya dalam hal pembinaan dan pemeliharaan bahasa. Pembinaan dan pemeliharaan bahasa merupakan upaya politik bahasa. Politik bahasa dalam pendidikan dapat dilakukan dengan menciptakan bahan ajar nonformal yang telah distandarisasi sehingga siswa tidak hanya memperoleh kecakapan yang melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sesuai konsep TPACK. Dampak yang dipaparkan merupakan upaya memodernkan bahasa, meningkatkan mutu penggunaan bahasa dan menjaga menjaga kelestarian bahasa melalui bidang pengajaran melalui litearasi digital yang secara tidak langsung telah mewujudkan upaya pembinaan dan pemeliharaan bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2011). *Politik Bahasa:Rumusan Seminar Politik Bahasa.* Hasan Alwi dan Dendy Sugonon. (Ed). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Belshaw, Douglas A. J. (2011) *What is "Digital Literacy"* (Master's Thesis). Diakses dari http://dougbeshaw.com//thesis

Beers, Kylene. dkk. 2010. *Standards for the Assessment of Reading and Writing*. International Reading Association and the National Council of Teachers of English. doi://www.google.com/url.

Buletin Pos dan Telekomunikasi. 2016. 14(2): 79—94

C. Angeli & N. Valanides. (Ed.). (2015). *Technological Pedagogical Content Knowledge Exploring, Developing, and Assessing TPCK*. New York, NY: Springer. doi:10.1007/978-1-4899-8080-9

Ghani, Rusli Abdul. (2013). "Penguatan Bahasa melalui Pemerkasaan Bangsa Berilmu". *Dalam Kongres Bahasa Internasional XI Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Gunarwan, Asim. (2003). "Pembalikan Pergeseran Bahasa Daerah untuk Memperkukuh Budaya Bangsa". *Kongres Bahasa Indonesia VIII*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

International Reading Association. (2009). *New Literacies and 21st-Century Technologies: a Position Statement of the International Reading Association.* Newark, DE: Author.

Jose, K. (2016). Digital Literacy Matters: Increasing Workforce Productivity through Blended English Language Programs. *Higher Learning Research Communications*, *6*(4): 1—17. Diakses dari http:////files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1132743.pdf

Kemendikbud. (2017). *Materi Pendukung Literasi Digital*. Jakarta: Kemendikbud.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2018) *Jumlah Pengguna Internet 2017 Meningkat, Kominfo Terus Lakukan Percepatan Pembangunan Broadband.* Siaran Pers No. 53**.** Diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/12640/siaran-pers-no-53hmkominfo022018-tentang-jumlah-pengguna-internet-2017meningkat--kominfo-terus-lakukan-percepatan-pembangunan-broadband/0/siaran_pers/ kominfo/02 / 2018.
Mills, M.S. (2013). Facilitating Multimodal Literacy Instruction Through Digital Curation. *Technological Tools for the Literacy Classroom.* Whittingham, S. Huffman, W. Rickman, & C Wiedmaier Hershey (Ed.), 46–63, Hershery, PA: Idea Group Inc (IGI).
Mishra & Koehler. (2013). The Technological Pedagogical Content Knowledge Framework for Teachers and Teacher Educators. *ICT iItegrated Teacher Education: A Resource Book*, 2—3. Diakses dari http://cemca.org.in/ckfinder/userfiles/files/ICT%20teacher%20education%20Module%201%20Final_May%2020.pdf.
Nababan, P.W.J. (2014). Language In Education: The Case Of Indonesia. *Language Policy and Education,* 37(1): 115—131. Diakses dari http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp.
Nadya, Irwandari. (2017). *Mengapa Literasi di Indonesia Terendah*. [*Internet*]. Diakses dari https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170910122629-445-240706/mengapa-literasi-di-indonesia-sangat-terendah/ pada tanggal 15 April 2018.
Papapavlou, A. and Pavlou, P. (2005). Literacy and language-in-education policy in Bidialectal Settings. *Current Issues in Language Planning*. 6(2): 164—181, doi:10.1080/14664200508668279
Peled, Yael. 2014. *N*ormative Language Policy: Interface and Interfences. *Language Policy*. 13(4): 301—315 doi:10.1007/s10993-014-9325-z.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1976a). *Politik Bahasa Nasional 1*. Amran Halim (Ed). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaaan.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1976b). *Politik Bahasa Nasional 2*. Amran Halim (Ed). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaaan.
Selber, S. (2004). Multiliteracies for a Digital Age. *IEEE Transactions On Professional Communication*, 48(4): Diakses dari https://booksc.org/book/3475635/45dae1.
Son, J.B., Park, S.S., Park, M. (2017). Digital Literacy of Language Learners in Two Different Contexts, *JaltcallJournal 13*(2): 77—96.
Sumadyo, Bambang. (2010). *Bahasaku "Indglishnesia" Sebuah Kajian Penggunaan Kata Bahasa Asing dalam Bahasa Indonesia*. 2 (3):170—177.
Ungerer, L.M. (2016). Digital Curation as a Core Competency in Current Learning and Literacy: A Higher Education Perspective. *International Review of Research in Open and Distributed Learning.* 17(5):*1—5.* doi:https://eric.ed.gov/?q=teaching+materials+of+digital+&id=EJ1117357
Wolff, A. & Mulholland, P. (2013). Curation, Curation, Curation. *In Proceedings of the 3rd Narrative and Hypertext Workshop. 1—5.* Diakses dari http://nht.ecs.soton.ac.uk/2013/papers/1-awolff.pdf
Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.